



Transformasi Ruang di Universitas: Dari Ruang Publik ke Ruang Privat

Rizqyansyah Fitramadhana ^{a,1}

^aUniversitas Gadjah Mada, fitramadhanarizqyansyah@gmail.com

ABSTRAK

Kata kunci:

Ruang kerja komunal, Ruang publik, Privatisasi, Transformasi

Ruang publik di universitas sedang mengalami transformasi besar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan mengkritisi transformasi ruang di kampus negeri tersebut. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara mendalam, serta studi pustaka. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan secara khusus menekankan realisme kritis sebagai paradigma utama untuk membongkar mekanisme umum yang melandasi sebuah realitas sosial, dalam hal ini transformasi spasial. Menggunakan teori kritis dari Henri Lefebvre, studi ini menghasilkan tiga kesimpulan. Pertama, kehadiran fasilitas modern seperti *coworking space* dan *digital lounge* merupakan pertanda perubahan spasial, tidak hanya secara material saja namun juga pada secara imajiner dan simbolik. Transformasi ruang tersebut terpusat pada bergantinya ruang publik menjadi ruang privat. Kedua, transformasi spasial dari ruang publik menjadi privat tidak pernah lepas dari kepentingan kaum borjuis. Terakhir, penelitian ini berargumen bahwa transformasi ruang tersebut memiliki potensi buruk bagi berlangsungnya kehidupan sosial-politik kampus.

ABSTRACT

Keyword:

Coworking space, public space, Privatization, Transformation

*Public space in the university is undergoing great transformation. This study aims to describe and criticize the contemporary transformation of space in-state university in Indonesia. Method which deployed is field observation, deep interview, and literature review. To make such an effort palpable, this research will use a qualitative methodology and specifically will emphasize critical realism as a core paradigm to seek the general mechanism of social reality. Using the critical theory of space developed by Henri Lefebvre, this research produces three results. First, the existence of modern facilities such as *coworking space* and *digital lounge* is a designation of the transformation of space, not only physically but also imaginary and symbolically. This transformation has its center on how space changes its ground characteristic from public-owned to private-owned. Second, the transformation to private space is inextricably correlated to the dominant class that is the bourgeois. Finally, such space transformation affects detrimentally the way in which social-political lives are conducted in the university.*

Copyright © 2018 Tadris IPS Institut Agama Islam Negeri Kudus. All Right Reserved

Pendahuluan

Revolusi Industri 4.0 (RI 4.0) sedang menjadi *mother of discourse*ⁱ di berbagai kampus negeri. Semua harus dibungkus dengan frasa “revolusi industri”. Kalau tidak, maka bisa dibilang kurang *up-to-date*, kolot, dan tradisional. Memperbincangkan universitas tanpa slogan revolusi industri, digital dan teknologi merupakan hal yang tidak afdal. RI 4.0 dengan segala atribusinya sudah mencapai level hegemonik.

Diskursus RI 4.0 menjalar ke hampir semua bidang, termasuk soal urusan ruang.

Belakangan ini, banyak ruang di PTN dikemas dengan embel-embel digital. *Coworking space*ⁱⁱ, perpustakaan digital, dan *digital lounge* adalah beberapa yang mulai menyeruak ke permukaan. Eksistensinya menandai pemahaman baru tentang ruang; sebuah transformasi besar yang tidak pernah ada sebelumnya. Era ketika ruang menjadi lebih berorientasi pada kerja, disiplin, tidak bebas, ketat dan privat. Perubahan ini berjalan beriringan dengan menipisnya kehadiran ruang publik seperti gelanggang, sekretariat mahasiswa, dan taman bersama yang mempunyai karakteristik bebas, dinamis, dan

publik. Dua realitas yang bertolak belakang ini mulai tumbuh subur dan berjalan dengan cepat.

Ruang yang timbul dari aktivitas dominan kapital selalu bersifat privat dengan karakteristik kepemilikan pribadi (Don Mitchel, 1995; Eric Klinenberg 2018). Ciri utama ruang privat adalah adanya pembatas antara ruang tersebut dan dunia luar, biasanya dalam bentuk pagar. Eksistensi pagar merupakan simbol utama bahwa sebuah ruang telah berubah menjadi ruang privat (Henri Lefebvre, 1991). Diberbagai literatur, fenomena transfigurasi ruang ini dinamakan sebagai privatisasi; sebuah proses perubahan ruang publik menjadi ruang privat.

Di Indonesia gejala privatisasi ruang sudah mulai terdeteksi (Bobi Setiawan, 2010; Adi Putra & Daim Triwahyono, 2019; Purwanto, 2014). Mayoritas literatur yang membahas mengenai privatisasi ruang di Indonesia masih menyinggung soal transformasi fisik. Padahal perubahan ruang tidak hanya menyuguhkan pergantian fisik namun juga munculnya relasi dan imajinasi sosial baru tentang ruang (Michel Foucault, 1986; Henri Lefebvre, 2009; Edward Soja, 1989). Sementara itu, dari sekian banyak penelitian yang membahas tentang ruang hanya ada beberapa yang membahas kontestasi ruang di universitas (Agung Budhi, 2012; Rony Gunawan Sunaryo, 2010). Sayangnya, dari dua penelitian tersebut tidak ada yang menjelaskan transformasi ruang berkenaan dengan intrusi *coworking space*.

Nihilnya kajian yang mencoba menjelaskan perubahan ruang di universitas membuat penelitian ini semakin urgen. Oleh karena itu, tujuan utama penelitian ini adalah memberikan penjelasan komprehensif mengenai transformasi ruang supaya *homo academicus* tetap waspada. Penelitian ini berangkat dengan tiga rumusan masalah utama: apa faktor utama yang menyebabkan transformasi ruang di universitas? Bagaimana proses tersebut terjadi? Implikasi seperti apa

yang ditimbulkan pada aspek relasi sosial dan politik?

Penelitian ini mendayagunakan teori ruang Henri Lefebvre. Menurut Lefebvre (2009) ruang punya logika produksinya sendiri.ⁱⁱⁱ Aktivitas produksi tersebut tidak pernah lepas dari mode produksi yang dominan di masyarakat. Menukil kerangka teoritis Marx, mode produksi merupakan konsep yang digunakan untuk menjelaskan sistem ekonomi-politik suatu masyarakat. Mode produksi memiliki dua penyangga utama yaitu *productive forces* (tenaga buruh dan mesin) dan relasi produksi (hubungan antara pemilik dan pekerja) (Louis Althusser, 2014). Maka, jika sebuah tatanan masyarakat didominasi oleh mode kapitalistik maka bisa dipastikan ruang yang eksis di sekelilingnya merupakan jelmaan dari kepentingan aktor kapitalisme. Sebaliknya, jika mode produksinya agraris maka ruang yang tercipta adalah cerminan kepentingan agen yang berkuasa di dalamnya.

Lebih lanjut, Lefebvre membagi tiga konstruksi dasar soal ruang. Pertama, *spatial practice*. Aspek pertama ini berkaitan dengan praktik spasial atau performativitas seseorang di dalam sebuah ruang. Kedua, *representation of space*. Secara eksplisit menyangkut masalah representasi relasi produksi yang sebuah ruang tanamkan melalui penampilan fisiknya. Ketiga, *representational space*. Kurang lebih menjelaskan soal simbolisasi kompleks sebuah ruang dan implikasinya pada imajinasi individu di sekitar wilayah spasial tersebut. Tiga fondasi dasar ruang yang saling berkaitan itu biasa disebut dalam ilmu sosial dengan *triad of space*. Model analisis berjenjang tiga tersebut sebenarnya tidak hanya digunakan oleh Lefebvre seorang, Michel Foucault (1986) dan Edward Soja (1989) juga mengusulkan tipe yang serupa.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Paradigma yang dipakai adalah realisme kritis. Sebagai sebuah paradigma, realisme kritis berangkat dari

anggapan bahwa ada hal objektif yang eksis di luar pemahaman manusia (Roy Bhaskar, 1978; Rom Harre, 1970). Sesuatu yang objektif tersebut dinamakan objek intransitif. Menurut pemahaman realisme kritis, struktur (baik itu sosial, budaya maupun politik) merupakan kenyataan objektif atau intransitif karena dia merupakan episentrum kenyataan sosial sedangkan realitas sosial yang dihasilkannya adalah objek transitif.

Secara eksplisit, realisme kritis fokus pada mekanisme umum yang menghasilkan sebuah realitas. Berbeda dari pendekatan kuantitatif-deduktif yang hanya menjelaskan sebuah kejadian, realisme kritis mencari sumber fenomena dengan menggunakan logika abduksi dan retroduksi (Andrew Sayer, 1992). Dengan cara pandang seperti itu realisme kritis ingin menggeser fokus penelitian dari epistemologi menuju ontologi, dari kejadian ke sumber penyebab realitas. Kerangka berpikir tersebut mengandaikan pelibatan logika sebab-akibat (Berth Danermark et al, 2005). Oleh karena itu, pertanyaan utama yang ingin dijawab oleh realisme kritis dengan demikian adalah “Bagaimana sebuah fenomena bisa terjadi? Jika fenomena tersebut adalah X, kita bisa memformulasikan sebuah pertanyaan: Syarat (properti) apa saja yang bisa membuat X terjadi? Apa yang membuat X bisa terwujud?” (Berth Danermark et al, 2005).

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Sumber primer berasal dari wawancara sedangkan sumber sekunder bersandar pada studi pustaka. Informan utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara terstruktur. Observasi dan wawancara dipilih karena dinilai mampu membantu penulis mendapatkan mekanisme umum realitas sosial.

Langkah pertama yang mesti ditempuh ketika menggunakan paradigma realisme kritis adalah mendeskripsikan dan

mengkonseptualisasikan properti dan mekanisme kausal yang mendorong terjadinya fenomena. Tahapan selanjutnya adalah bergerak dari konseptualisasi menuju realitas konkret. Langkah kedua ini dilakukan dengan menggunakan prosedur standar penelitian kualitatif berupa penyemaian data, mengorganisasi dan menganalisis data, *coding* data sehingga mendapat tema dan deskripsi umum, menyambungkan tema serta deskripsi, interpretasi (Creswell, 2009).

Hasil dan pembahasan

Sebuah Intervensi Empiris: Transformasi Ruang di Universitas

Coworking space dan *digital lounge* merupakan normalitas baru di kampus negeri. Di Universitas Indonesia, ruang kerja komunal baru saja selesai dibangun pada tahun 2019. Awal tahun ini Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL) UGM meresmikan *BRIWork*, *coworking space* yang dikerjakan bersama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Tidak jauh dari situ, tepatnya di Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM, ada *Digital Lounge-Offline Center for Technology and Observation Laboratory* (OCTO Lab) yang memiliki konsep serupa. Universitas Airlangga juga sudah memiliki *coworking space* sebagai penunjang program Kampus Merdeka.^{iv} Deretan contoh tersebut menunjukkan bahwa demam *coworking space* tampaknya sedang terjadi. Setiap ruang di kampus negeri ingin disulap menjadi ruang kerja komunal dan *digital lounge*. Pertanyaannya, kenapa harus *coworking space*? Apa kepentingannya?

Kepentingannya adalah mendukung program pemerintah dan mencetak wirausaha (sosial). Saat membuka ruang kerja komunal baru UI^v, Direktur Pengelolaan dan Pengembangan Unit–Unit Usaha menjelaskan bahwa “kehadiran *coworking space* ini merupakan bentuk kontribusi nyata UI menumbuhkembangkan ekonomi kreatif serta mendukung program pemerintah Gerakan

Nasional 1000 *Startup Digital*". Ketika meresmikan *BRIWork*, Dekan FISIPOL UGM berkata "Teman-teman mahasiswa diberikan tempat kerja yang sangat baik untuk belajar dan beraktivitas. Ini sangat sesuai dengan visi UGM untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi *entrepreneur*".^{vi}Jadi, bangunan fisik tersebut mempunyai tujuan yaitu membantu pemerintah dalam mensukseskan program ekonomi kreatif. Namun, apakah usaha itu selalu berjalan baik dan tidak ada pihak yang dikorbankan? Bagaimana sesungguhnya proses pembangunan *coworking space*? Apa dampaknya?

Jawabannya adalah tidak. Pembangunan infrastruktur digital seperti *coworking space* dan *digital lounge* terkadang harus mengorbankan kepentingan satu kelompok. Ruang kerja komunal dan *digital lounge*—yang sering dibangun oleh kampus bekerja sama dengan bank atau perusahaan—juga seringkali menyingkirkan kepentingan publik. Kita bisa mengambil contoh dari *Digital Lounge-Offline Center for Technology and Observation Laboratory* (OCTO Lab) yang berada di Gedung U FEB UGM.^{vii} Dahulu ruang yang sekarang ditempati oleh OCTO Lab adalah *sekretariat*^{viii} mahasiswa. Sekretariat merupakan tempat khusus yang diperuntukkan untuk menunjang aktivitas berbagai macam organisasi di kampus. Bentuk umum dari sekretariat adalah ruang kecil yang bersekat. Ruang tersebut sering dimanfaatkan sebagai lokus penyimpanan barang serta tempat berkumpul dan berbagi cerita. Karena multifungsi, sekretariat dinilai begitu penting bagi semua organisasi mahasiswa. Setiap jengkal perubahan yang tidak melestarikan kepentingan mahasiswa tentu akan melahirkan perlawanan. Resistensi itu utamanya disebabkan oleh proses yang tidak ideal. Hal ini terjadi pada proses pembangunan OCTO Lab yang—menurut laporan BPPM Equilibrium—dibangun dipertengahan semester ketika mahasiswa sedang fokus belajar dan belum mempersiapkan apa-apa termasuk pemindahan barang serta ruang berkumpul yang baru. Mahasiswa tentu melayangkan protes, tetapi

suara mereka tidak digubris. Pembangunan tetap dilangsungkan meski harus mengorbankan satu kelompok dan praktik spasialnya.

Selain prosesnya yang janggal, infrastruktur material ini memiliki efek masif, khususnya menyangkut urusan praktik spasial. Laporan dari BPPM Equilibrium FEB UGM menyebutkan bahwa sesudah OCTO Lab berdiri, praktik ruang berubah secara drastis. Sekretariat yang dahulu bebas akses sekarang menjadi penuh dengan limitasi, pergerakan orang menjadi sangat terbatas karena penggunaan ruang diatur dengan waktu yang ketat; penggunaannya bahkan dijadwalkan. Peran sekretariat sebagai pembentuk infrastruktur sosial juga hilang karena OCTO Lab tidak menghendaki seseorang untuk berlama-lama di situ; fungsi *bonding*, dengan demikian, ikut lenyap bersamaan dengan bergantinya sekretariat menjadi OCTO Lab. Fungsi penyimpanan barang juga ikut terdampak. Menurut liputan itu mahasiswa kebingungan akan menaruh perabotan di mana lagi jika ada perhelatan besar. Oleh karena itu, dari paparan tersebut kita bisa membuat proposisi sementara bahwa pembangunan OCTO Lab pada dasarnya berhasil menghapus praktik ruang tertentu. Pertanyaannya, apakah kemudian praktik ruang ikut berhenti ketika OCTO Lab sudah dibangun? Jawabannya tentu saja tidak. Produksi ruang bakal menghasilkan praktik ruang yang baru. Bersamaan dengan itu lahir pula perspektif (*representation of space*) dan gambaran (*representational space*) baru tentang ruang. Artinya, pembangunan OCTO Lab sebenarnya tidak menghilangkan praktik ruang. Ia justru menciptakan praktik, perspektif, serta gambaran anyar soal ruang.

Ada beberapa hal baru yang tercipta. *Pertama*, pembatasan praktik spasial. Organisasi hanya bisa menggunakan fasilitas tersebut untuk melakukan segelintir aktivitas seperti rapat. Tidak ada kegiatan lain yang bisa dilakukan karena ruang dipakai secara bergantian. Artinya, di sini terdapat upaya pengkondisian dan homogenisasi tindakan;

setiap orang diberi batasan waktu tertentu dan didorong untuk melakukan aktivitas tertentu. *Kedua*, pembentukan perspektif baru. Perancang OCTO Lab berhasil mendesain sebuah pemahaman baru tentang ruang. Konsepsi ruang yang ia ciptakan sangat berbeda dari realitas ruang sebelumnya. Desain ruang tanpa sekat dan penuh dengan batas fisik membawa pemahaman baru soal ruang. Konstruksi spasial OCTO Lab tersebut menghilangkan perspektif kepublikan tentang ruang yang dahulu dimiliki oleh sekretariat mahasiswa dan menggantinya dengan suntikan pengetahuan keprivatan tentang ruang. Dengan kata lain, perubahan dalam bentuk fisik sejatinya selalu diikuti oleh transformasi kognitif atas ruang. *Ketiga*, berubahnya gambaran tentang ruang. Ruang yang telah diubah dan digunakan menghasilkan sebuah imajinasi serta simbol baru. Bentuk tanpa sekat dengan praktik spasial terbatas pada rapat membuat OCTO Lab dekat dengan kesan produktif dan kerja. Ruang di sini disempitkan maknanya menjadi hanya sekedar tempat untuk melakukan pekerjaan yang berujung pada produktivitas.

BRIWork adalah contoh lain yang bisa kita bahas di sini. Sebelum menjadi *coworking space*, ruang yang ditempati oleh *BRIWork* adalah bagian dari ruang publik bernama *Fisipmart*. Zona spasial tersebut merupakan sebuah toko namun juga dilengkapi dengan lokasi belajar yang strategis dan nyaman. Penggabungan tempat perbelanjaan dengan tempat belajar merupakan paradigma utama *Fisipmart*. Konsep ruang yang unik, efektif dan efisien membuat *Fisipmart* menjadi primadona bagi kalangan mahasiswa. Akses ruang yang mudah serta jaringan internet yang stabil adalah alasan lain mengapa *Fisipmart* tidak pernah sepi pengunjung.^{ix}

Citra *Fisipmart* sebagai ruang publik mulai pudar ketika *BRIWork* selesai dibangun. Model *coworking space* dengan kombinasi pelayanan bank telah memarjinalkan ide soal kepublikan. Ruang yang sebelumnya bisa

diakses dengan gampang oleh mahasiswa berubah menjadi area yang sulit ditembus. Fasilitas yang dahulu bisa dinikmati tanpa syarat hilang, pengunjung mesti memenuhi ketentuan tertentu sebelum diperbolehkan masuk. Semua itu terjadi karena *BRIWork* telah membangun sebuah pagar tidak terlihat (*invisible fence*) yang memisahkan dirinya dengan logika spasial bangunan sebelumnya. Transisi cara berpikir tentang ruang ini ikut membentuk ruang baru. Penjelasan lengkap dampak transenden maupun material perubahan tersebut peneliti bisa memperjelas apa yang sesungguhnya terjadi.

Pertama, dari publik menuju privat. Sifat publik *Fisipmart* digambarkan dengan kemudahan mobilitas mahasiswa. Pergerakan orang tidak dibatasi melalui persyaratan tertentu. Di sinilah letak kepublikan *Fisipmart*. Pergeseran menuju ruang privat ditandai oleh adanya hambatan. Eksistensi pagar merupakan pertanda utama sebuah ruang sudah sah menjadi ruang privat. Dalam kasus *BRIWork*, pagar itu disimbolkan oleh kartu *Brizzi*. Setiap orang yang ingin masuk ke dalam ruang kerja komunal mesti menggunakan kartu tersebut. Ketetapan tersebut membuat pergerakan orang sangat terbatas, hadirnya kartu *Brizzi* mengantarkan ruang yang seharusnya bersifat komunal menjadi begitu privat; hanya segelintir orang yang bisa masuk. Selain itu, *BRIWork* juga menciptakan efek detrimental berupa munculnya segregasi spasial; akses terhadap ruang didasarkan pada posisi stratifikasi kelas seseorang. Itu dibuktikan dengan adanya syarat pembuatan kartu yang memerlukan asistensi uang lebih serta pemampatan penggunaan spasial pada aspek produktif-inovatif-kreatif yang merupakan karakteristik kelas menengah urban perkotaan. Dengan demikian, eksistensi *BRIWork* sebenarnya malah memperburuk hegemoni kelas yang sedang berlangsung daripada memperbaikinya.

Kedua, kuasa total relasi sosial ekonomi. Ruang merupakan medium berlangsungnya relasi sosial. Di dalam ruang

individu berinteraksi satu sama lain dan membentuk sebuah gambaran spasial. Sebelum direnovasi, *Fisipmart* mewakili keberagaman relasi sosial antar individu. Toko yang berada di sebelah timur mencerminkan hubungan sosial ekonomi sedangkan fasilitas meja dan kursi di barat diisi oleh ikatan politik sehari-hari seperti diskusi kecil informal antar teman. Heterogenitas ini lenyap ketika *BRIWork* selesai dibangun karena aktivitas yang kemudian menjadi pegangan utama adalah produktivitas berupa jargon instrumental ‘kerja, kerja, kerja.’ Slogan ini melambangkan sebuah asketisme kapital yaitu kerja keras dan pengorbanan. Akan tetapi, berbeda dari semangat mengejar keuntungan *a la* Weber, libido produktivitas yang dimaksud di sini mengkrystal pada kegigihan menemukan inovasi *a la* kapitalisme kognitif atau *knowledge-based economy*.^x Perjuangan mencapai produk inovatif, seperti yang dikatakan oleh Paul David dan Dominique Foray (2002), memerlukan tempat yang kondusif. *Coworking space* dengan konsep utama interaksi antar pekerja di dalam satu ruang merupakan desain yang pas. Dengan kata lain, *BRIWork* sesungguhnya merupakan potensi altar utama proses produksi fase ketiga kapitalisme yang mengandalkan pengetahuan sebagai basis *forces production*nya. Kuasa relasi sosial yang berlandaskan ekonomi masuk dan mendeterminasi secara total aktivitas manusia di dalamnya.

Ketiga, munculnya kontradiksi ruang: *BRIWork* tentu tidak melulu lekat dengan deskripsi negatif. Terlepas dari semua dampak buruk yang terjadi, *BRIWork* pada kenyataannya juga membawa kemudahan dan kenyamanan. Ruang ber-AC, sofa yang empuk, serta fasilitas lainnya merupakan peningkatan yang bisa kita lihat. Secara berkelindan, dua fenomena tersebut menciptakan sebuah kontradiksi; ruang menghasilkan kemajuan sekaligus dekadensi, menciptakan kemudahan juga kesulitan. Kontradiksi ini akan terus terlihat selama orientasi pengetahuan serta memori tentang ruang tetap hidup di antara

civitas akademika. Namun, pelestarian sejarah spasial ini sangat rapuh mengingat kenikmatan yang ditawarkan oleh kapitalisme terkadang mampu dengan sendirinya menyembunyikan kontradiksi spasial; menampakkan keindahan tanpa memperlihatkan kekotoran.

Sumber Transformasi Ruang: Ekonomi-Politik Ruang

Analisis ruang dalam tulisan ini akan terlihat membosankan apabila tidak menyinggung perspektif ekonomi-politik. Pelibatan aspek ekonomi-politik diperlukan untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan dasar “*who gets what, when, and how.*”^{xi} Maka, tugas ekonomi-politik ruang adalah menjelaskan secara terperinci siapa yang diuntungkan dari ruang baru di universitas. Namun, sebelum mendedahkan siapa yang diuntungkan, sepertinya kita perlu mengetahui terlebih dahulu akar transformasi ruang yang sudah dijelaskan secara panjang lebar di atas.

Dari deskripsi perubahan ruang yang dijelaskan di bagian sebelumnya kita mengetahui kenyataan bahwa entitas privat berperan besar dalam pembangunan ruang kerja komunal dan *digital lounge*. Fakta ini mengundang pertanyaan besar, mengapa pihak privat seperti perusahaan dan bank bisa bergerak dengan mudah di lingkungan kampus? Bagaimana mungkin mereka mempunyai akses yang sangat besar untuk mengeksplorasi ruang dengan bebas? Jawaban singkat dari pertanyaan ini adalah liberalisasi, komersialisasi dan privatisasi pendidikan tinggi. Entitas privat tidak akan pernah bisa muncul dan menjadi aktor aktif di kampus negeri tanpa adanya dukungan dari tiga proses tersebut (Darmaningtyas, 2014). Logikanya begini: liberalisasi pendidikan tinggi membuat intervensi negara berkurang—khususnya pada aspek operasional-manajerial (dana)—,peran kosong itu kemudian digantikan oleh entitas privat. Intrusi privat di lembaga publik ini dinamakan privatisasi. Di sini institusi publik tidak lagi dikendalikan secara hegemonik oleh negara, liberalisasi telah mengizinkan pihak

privat masuk (Savas, 1982; Brown, 1995). Jadi, menyusutnya sumbangan dana untuk kebutuhan operasional (liberalisasi) membuat universitas memalingkan diri ke privat dan membawa entitas privat pada posisi tawar yang menguntungkan (privatisasi).

Di Indonesia proses privatisasi dimulai secara besar-besaran setelah reformasi. Latar belakang masifnya privatisasi di waktu spesifik tersebut tidak lepas dari keterlibatan lembaga finansial internasional seperti *International Monetary Fund* (IMF). Berlangsungnya privatisasi di Indonesia bahkan boleh dibilang disutradarai oleh IMF (Richard Robison & Vedi Hadiz, 2003). Hal itu bisa terjadi karena IMF merupakan institusi yang berani meminjamkan uang kepada Indonesia dengan syarat harus menandatangani *Letter of Intent* (LOI) yang isinya kurang lebih mewajibkan Indonesia untuk mengadopsi resep liberalisasi finansial IMF. Setelah kesepakatan sudah disahkan IMF bergerak cepat menyusun tawaran kebijakan ekonomi-politik yang mesti dijalankan Indonesia jika mereka ingin keluar dari belenggu krisis ekonomi. Seperti yang sudah diperkirakan berbagai kebijakan tersebut tidak jauh dari preskripsi neoliberal; liberalisasi, privatisasi dan komersialisasi (Joseph Stiglitz, 2003).

Setelah berhasil membuka jalan liberalisasi finansial, IMF kembali bergerak, kali ini menysar perihal model organisasi institusi. Tawaran mereka jelas, semua institusi yang sebelumnya dijalankan oleh negara semata dan dioperasikan menggunakan spirit kolektif harus diubah orientasi operasionalnya menjadi pemenuhan mekanisme pasar supaya sektor privat bisa masuk dan bekerja sama dengan negara (Mohamad Ikhsan, 2002; Toto Pranoto, 2010); secara sederhana, IMF menginginkan adanya transisi dari *Old Public Management* (OPM) menuju *New Public Management* (NPM). Pemilihan NPM sebagai landasan organisasional institusi bukan tanpa alasan. IMF memilih NPM karena, secara teori, menghendaki adanya peran privat dalam

pelayanan publik dengan basis berpikir kompetitif, efektif, efisien dan berorientasi pada pasar (Christopher Hood, 1991). Karakteristik NPM seperti itu sangat menguntungkan bagi korporasi karena dengan menggunakan logika pasar, institusi negara tersebut sudah semestinya menyesuaikan diri dan entitas yang tepat untuk membimbing transformasi itu adalah privat (Christopher Hood, 1995).

Bukti nyata implementasi NPM bisa ditemukan di berbagai institusi plat merah, terutama BUMN dan lembaga pendidikan negeri. Khusus untuk institusi pendidikan, penerapan NPM secara dominan dilaksanakan di jenjang perguruan tinggi (Satryo Soemantri Brodjonegoro, 2012; Andrew Rosser, 2015; Azyumardi Azra, 2008). Hadirnya NPM di kampus negeri membuat intrusi perusahaan begitu mudah, banyak sekali kemudian korporasi yang masuk menawarkan kerja sama dengan pihak universitas dalam berbagai bentuk.^{xii} Salah satu yang umum ditemukan adalah pembangunan infrastruktur. Perusahaan menawarkan uang pembangunan sementara kampus mengizinkan logo perusahaan terpampang jelas di gedung tersebut. Fenomena tersebut sekarang jamak ditemui di berbagai PTN di Indonesia. Tengok misalnya kompleks Klaster Sosio-Humaniora UGM, deretan nama perusahaan seperti Yong Ma, BRI, CIMB Niaga, Pertamina menghiasi dinding gedung dengan jelas.

Coworking space yang menjadi titik tolak tulisan ini juga punya relasi kuat dengan proses privatisasi. Tipe spasial seperti itu tidak akan eksis tanpa ada intervensi dari entitas privat. Seperti gedung lainnya, *coworking space* merupakan manifestasi konkret dari kehadiran korporasi di institusi negeri. Transformasi ruang di universitas bersumber dari liberalisasi dan privatisasi. Dua proses tersebut tentunya tidak bisa dipisahkan dari geliat neoliberalisme. Neoliberalisme, seperti yang dijelaskan oleh David Harvey^{xiii}, merupakan konsolidasi konglomerat korporasi untuk merekonstruksi kekuatannya. Berkaca pada proposisi ini

menjadi jelas bahwa transformasi ruang yang dijelaskan di dalam tulisan ini menguntungkan kelas borjuis. Dengan memiliki ruang tersendiri di universitas, entitas privat berhasil mengatasi masalah jarak dan waktu dan menciptakan prospek profit baru. Hadirnya bangunan yang dekat dengan civitas akademika membuat layanan ekonomi bisa berjalan efektif dan efisien. Mahasiswa sebagai kelompok khusus juga mempunyai potensi ekonomi yang cukup besar. Kebanyakan dari mereka merupakan kelas menengah yang mampu mengakses pendidikan dan berada pada tingkat konsumsi tinggi. Gelontoran investasi untuk membangun gedung tidak terbuang sia-sia karena pundi-pundi uang akan terus bertambah seiring dengan meluasnya jangkauan pasar.

Senjakala Demokrasi?

Transformasi ruang publik menjadi ruang privat terjadi secara masif dan tumbuh secara eksponensial. Di kampus negeri, realitas ini bergulir bersamaan dengan infiltrasi entitas privat yang masuk melalui proses privatisasi pendidikan tinggi. Ruang privat, perusahaan, dan privatisasi, dengan demikian, merupakan jalinan yang tidak terpisahkan. Ketiganya adalah syarat utama transisi ruang publik ke privat. Lebih lanjut, dari eksplorasi sebelumnya diketahui realitas bahwa transformasi ruang secara fisik ternyata juga diimbangi oleh pergantian praktik, representasi, serta gambaran tentang ruang. Artinya, transmisi bentuk spasial tidak hanya memengaruhi aspek struktur namun juga suprastruktur; ruang tidak pernah lepas dari aspek sosial yang hadir di sekelilingnya, ia turut mengubah *mode of existence* masyarakat di dalamnya—baik secara resiprokal maupun monologal.

Konsepsi ruang Henri Lefebvre, Michel Foucault, dan Edward Soja menggarisbawahi pentingnya intervensi aspek sosial. Kontribusi mereka tidak bisa diremehkan karena upaya dekonstruktif ketiganya mampu secara gradual mengubah peta pemahaman serta permasalahan spasial. Kendati demikian, kita sepertinya mesti memperluas jangkauan analisis ruang ke dalam

lanskap politik. Ekstensifikasi ini merupakan konsekuensi logis dari bangkitnya pemikiran politik tentang ruang.^{xiv} Khususnya relasi antara ruang publik dan demokrasi. Di berbagai literatur, misalnya, John Parkinson (2006; 2009) memperlihatkan bagaimana ruang—menurut pengertian material—memiliki hubungan erat dengan beberapa pilar demokrasi. Argumen yang ia angkat sangat sederhana: ruang publik fisik sangat penting ketika kita ingin membicarakan demokrasi karena ia menyediakan tempat untuk melakukan artikulasi demokrasi. Di sini Parkinson fokus pada aspek performatif yang mungkin terwujud jika ruang masih mampu digapai oleh publik. Artinya, dia menggunakan basis berpikir demokrasi deliberatif sebagai pijakan teoritisnya.

Menurut Parkinson (2009), demokrasi deliberatif mempunyai “empat fungsi utama: mengartikulasikan kepentingan, opini, dan pengalaman; membuat klaim publik; memutuskan klaim; memeriksa keputusan dan tindakan.” Empat fungsi ini kemudian dia saring menjadi tiga yaitu (a) membuat klaim publik, (b) menelurkan keputusan kolektif serta (c) mengontrol penguasa untuk selanjutnya dikontekskan dengan permasalahan ruang publik dan demokrasi. Kita perlu memeriksa ketiganya secara lebih lanjut.

Pertama, membuat klaim publik. Kategori awal ini berkaitan dengan aktivitas seperti demo atau petisi. Kegiatan tersebut dilakukan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk mendapat rekognisi bahwa ada masalah genting yang sedang terjadi sehingga perlu perhatian lebih dari pemerintah. Ruang publik di sini berperan sebagai medium penyalur klaim publik. *Kedua*, menghasilkan keputusan kolektif. Ketika berdemonstrasi dan menduduki sebuah ruang, massa tidak hanya diam namun juga melakukan orasi serta persuasi. Secara bergantian pengunjung rasa mengeluarkan suaranya. Suasana ini menampakkan deliberasi yang berujung pada pembuatan keputusan kolektif. Menurut Parkinson, keputusan ini

hadir karena ada ruang publik yang memfasilitasinya. *Ketiga*, memeriksa penguasa. Demonstrasi dan pembuatan petisi merupakan cara yang dilakukan oleh masyarakat untuk menunjukkan kepada penguasa bahwa mereka mesti kembali ke titik awal sebagai pelayan kepentingan rakyat dan dengan itu harus tunduk pada rakyat. Dengan kata lain, momen unjuk rasa digunakan oleh masyarakat untuk mengontrol penguasa. Lagi-lagi esensi penting ini tidak akan bisa terlaksana apabila ruang publik yang menjadi penyalurnya musnah.

Melalui lensa teori politik, Parkinson mencoba menggabungkan dua konsep—*public space* dan demokrasi—yang sebelumnya belum terjamah. Proposal yang dia ajukan sangat penting mengingat semakin gencarnya pengambilalihan ruang publik oleh entitas privat. Meskipun begitu, usaha sinkretis Parkinson tetap mengandung batasan dan perlu dielaborasi lebih lanjut. Limitasi khususnya terkonsentrasi pada sifat spontanitas ruang publik yang ditawarkan oleh Parkinson. Ruang publik benar-benar menjadi altar performatifitas demokrasi ketika sesuatu yang besar terjadi. Tidak ada bahasan mengenai proses konstruksi politik yang berkelanjutan, khususnya masalah interpelasi subjek. Dengan kata lain, ruang publik Parkinson tidak memberi wadah pada politik sehari-hari yang sejatinya merupakan bagian tak terpisahkan dari demokrasi. Terlepas dari kritik tersebut inisiatif Parkinson patut diapresiasi. Idenya bisa langsung kita aplikasikan untuk menelisik bagaimana privatisasi ruang publik berimplikasi pada demokrasi.

Apabila dikontekskan dengan isu soal transformasi ruang di universitas maka perubahan ruang publik menjadi ruang privat bisa dikatakan sebagai upaya terstruktur untuk—tidak hanya memusnahkan praktik, representasi, serta gambaran spasial—membunuh demokrasi. Itu terjadi karena ruang yang sedianya dimanfaatkan untuk membuat klaim publik dan menelurkan keputusan

kolektif tidak ada. Padahal, pembentukan klaim publik serta keputusan kolektif memerlukan ruang publik karena pada dasarnya dua fungsi tersebut bukanlah barang jadi namun kulminasi dari sebuah proses komunikasi intersubjektif. Argumen lain adalah erosi ruang publik berpotensi memberangus praktik deliberasi yang merupakan infrastruktur penting demokrasi. Proposisi kedua ini bisa kita alamatkan pada kegunaan ruang publik sebagai tempat produksi subjek dan pengetahuan berlangsung. *Public space* di sini merupakan wadah material berkumpulnya individu, komunitas dan organisasi untuk mendiskusikan sebuah isu baik secara informal maupun formal. Diskusi mengandaikan resiprokalitas sejajar antar individu supaya aliran informasi dari satu pihak ke pihak lain bisa mengalir sehingga mampu menghasilkan sebuah pengetahuan reflektif. *Public space* dengan demikian kompatibel dengan *public sphere*; keduanya saling mengandaikan satu sama lain. Pendiskreditan salah satu diantara keduanya niscaya akan berakibat fatal pada pemahaman kita atas jalannya demokrasi.

Kesimpulan

Melalui penelusuran panjang di bagian sebelumnya, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Transformasi ruang merupakan realitas kontemporer yang terjadi di kampus negeri. Dengan menggunakan cara pandang spasial kritis, penelitian ini menunjukkan bagaimana perubahan ruang yang terjadi di kampus negeri bersumber dan mengandung kepentingan dari kaum borjuis. Pembangunan ruang baru berbentuk ruang kerja komunal mewakili praktik, representasi serta imajinasi spasial yang penuh dengan intensi ekonomistik. Kemunculan model spasial tersebut secara berkelindan ikut mengubah tampilan fisik serta aspek mental tentang ruang—dari ruang publik menjadi ruang privat. Ruang yang dahulu bebas akses, bersekat dan bersifat multifungsi berubah menjadi ruang

yang penuh dengan pagar, tidak bersekat dan mempunyai karakteristik monodimensi.

2. Transisi ruang tersebut, di sisi lain, mempunyai efek detrimental bagi berlangsungnya kultur sosial dan politik di kampus negeri. Ketika ruang yang sebelumnya memiliki fungsi ganda dan menjadi episentrum penguatan jalinan sosial antar individu dihapus kemudian diganti oleh tipe spasial satu dimensi yang hanya berorientasi pada kerja maka potensi munculnya tirani ruang tidak terhindarkan lagi. Tirani spasial itu lalu mendaratkan sebuah kekuasaan untuk membatasi aktivitas sosial dan politik sehingga memungkinkan untuk mematikan aspek sosial dan politik secara bersamaan.
3. Demokrasi berpotensi menemui jalan terjal untuk bisa berkembang jika ruang publik terus mengalami erosi. Itu bisa terjadi karena memusnahkan *public space* sama dengan

ⁱIstilah ini dikenalkan oleh Michel Foucault (1972) dalam bukunya *Archeology of Knowledge* yang kurang lebih berarti akar diskursus. Contoh yang diberikan oleh Foucault adalah Karl Marx dan Sigmund Freud. Penunjukkan dua teoritis tersebut sebagai aras utama diskursus tidak lepas dari kontribusi keduanya dalam khazanah pemikiran. Dari konsepsi dasar itu dapat dikatakan bahwa penyematan *mother of discourse* pada RI 4.0 merupakan tanda sahih bahwa RI 4.0 adalah salah satu sentral wacana di universitas.

ⁱⁱ*Coworking space* adalah tempat kerja bersama para pekerja pengetahuan profesional yang berasal dari berbagai macam spesialisasi industri pengetahuan—mayoritas merupakan pekerja lepas—berkumpul dan membentuk komunitas bersama. Sejarah ruang kerja komunal dimulai pada tahun 2005 di San Fransisco ketika seorang pekerja lepas bernama Bred Neuberg berinisiatif membangun sebuah tempat bernama “*Hat Factory*” yang memungkinkan interaksi intens antara satu freelancer dengan yang lainnya (Tadashi Uda, 2013). Kemunculannya tidak pernah lepas dari pertumbuhan industri pengetahuan dan perkembangan *knowledge-based economy*. Bersamaan, dua proses itu mengubah konsep, pola

menghancurkan *public sphere*; penghilangan *public space* sebagai mediator deliberasi politik bisa mengancam langsung keberlangsungan demokrasi karena demokrasi pada dasarnya dibangun dari keterlibatan rakyat di ranah *public sphere*, ini mungkin terjadi apabila subjek demokrasi bisa terbentuk dari proses komunikasi intersubjektif di dalam *public space*. Dua kategori ini berkaitan satu sama lain; diskursus demokrasi tidak akan ada tanpa eksisnya lokus publik yang mendukung terciptanya komunikasi antara satu subjek dengan subjek demokrasi lainnya, ruang publik akan begitu hampa jika diskursus demokrasi tidak ditempatkan sebagai titik tolak utama penggunaan ruang.

serta struktur dunia kerja sehingga menghasilkan pekerja pengetahuan dengan sifat bebas, memencar dan rentan (Alessandro Gandini, 2015; Greig de Peuter et al, 2017). Profil pekerja pengetahuan yang jelas berbeda dari pekerja industri selanjutnya melahirkan sebuah transformasi besar dalam segala hal, termasuk di sini soal kebutuhan ruang untuk bekerja. Karakteristik kerja yang fleksibel dan distributif tentu tidak cocok dengan tipe rumah produksi tersentral seperti pabrik. Namun tren itu tidak secara keseluruhan mengirim pekerja pengetahuan bekerja di rumah setiap waktu. Faktanya, corak produksi yang mengandalkan inovasi dan kreativitas memerlukan interaksi sosial. Kekosongan ini kemudian diisi oleh *coworking space*.

ⁱⁱⁱ“Dahulu, frasa ‘ruang’ memiliki makna geometrik yang ketat: ide yang ia singgung hanya berkaitan dengan area kosong.” Ruang, menurut pemahaman geometri, bersifat netral dan terbatas pada ruang fisik. Karena bersifat netral, pertanyaan mengenai kepentingan secara otomatis absen dari pembahasan. Ruang dinilai sebagai *creatio ex nihilo*; sesuatu yang hadir dalam ruang hampa. Cara pandang ruang seperti itu ditentang oleh Henri Lefebvre. Menurutnya, ruang tidak hanya bisa didekati menggunakan paradigma geometrik. Melalui penelusuran sejarah pemikiran soal ruang,

Lefebvre menyimpulkan bahwa ruang sebenarnya mempunyai karakteristik sosial dan merupakan produk sosial. “Ruang (sosial) merupakan produk (sosial)...Setiap masyarakat memproduksi ruangnya sendiri...masyarakat di sini merupakan cerminan dari *mode of production* yang melekat di dalamnya.” Ruang, dengan demikian, bukan merupakan benda mati namun sebuah konsep yang hidup dan terus diproduksi.

^{iv} Klik tautan berikut, <http://news.unair.ac.id/2020/02/04/dukungprogrammerdeka-belajar-unair-resmikan-co-working-space/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

^v Klik tautan berikut, <https://www.ui.ac.id/uiresmikan-co-working-space/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

^{vi} Klik tautan berikut, <https://ugm.ac.id/id/berita/19035-fisipol-ugm-miliki-co-working-space-baru>, diakses pada tanggal 15 Juni 2020.

^{vii}Sebagian besar bahasan tentang OCTO Lab berasal dari laporan BPPM Equilibrium FEB UGM; sebuah wadah jurnalistik di tingkat fakultas. Untuk melihat laporan tersebut pembaca bisa mengunjungi tautan berikut ini: <https://wartaeq.com/digital-lounge-sekre-yang-dulu-bukanlah-yang-sekarang/>.

^{viii}Terma ini digunakan untuk menggambarkan ruang yang sering dipakai mahasiswa berkumpul. Sayangnya, di dalam KBBi, frasa sekretariat atau sekre belum didefinisikan seperti itu. Namun, kata tersebut tetap digunakan dalam tulisan ini karena sekretariat sudah terlanjur menjadi kosa kata yang difungsikan mahasiswa untuk menunjuk ruang berkumpul mereka.

^{ix}Bagian pembahasan mengenai *BRIWork* merupakan hasil wawancara penulis dengan beberapa mahasiswa S1 Fisipol UGM sekaligus pengalaman pribadi penulis sebagai mahasiswa Fisipol UGM.

^xKapitalisme kognitif merupakan tesis yang dikemukakan oleh seorang Marxis bernama Jean-Moullier Boutang untuk menjelaskan perkembangan mutakhir dari kapitalisme yang mulai mengandalkan kekuatan pengetahuan. Dalam bukunya berjudul *Cognitive Capitalism*, Boutang (2011) memberikan sebuah eksplikasi yang komprehensif tentang transisi dari kapitalisme industri (sistem ekonomi yang mengandalkan modal terlihat seperti tanah, manusia dan modal) menjadi kapitalisme kognitif yang bertumpu pada hal tidak terlihat yaitu pengetahuan. Boutang menulis “*We call this mutating capitalism ‘cognitive capitalism’, because it has to deal with collective cognitive labour power, living labour, and no longer simply with muscle-power consumed by machines driven by ‘fossil-fuel’ energy*”.Maka, secara sederhana, kapitalisme kognitif bisa kita

definisikan sebagai era ketika sistem ekonomi kapitalisme mulai menggeser titik sentral proses produksinya dari tanah, tenaga manusia dan modal menjadi kemampuan pengetahuan. Itu artinya penggerak profit tidak lagi bersandar pada kelebihan tenaga manusia semata namun lebih menasar kreativitas dan inovasi. Pemahaman semacam ini sebenarnya mirip dengan apa yang disampaikan oleh Peter Drucker dalam bukunya *Post-Capitalist Society*. Diterbitkan pada tahun 1993, Peter Drucker tampaknya sudah memperkirakan secara brilian pergerakan kapitalisme bahkan jauh sebelum konsep kapitalisme kognitif populer.

^{xi}Penggalan kalimat ini merupakan definisi politik yang diajukan oleh ilmuwan politik Amerika Serikat Harold Laswell.

^{xii}Sampai sejauh ini belum ada penelitian yang secara khusus memfokuskan diri untuk mencoba menjelaskan bentuk kerja sama seperti apa saja yang mungkin disepakati oleh universitas negeri dan korporasi di Indonesia. Akan tetapi, menilik dari praktik yang sudah biasa terjadi di Amerika Serikat, universitas biasanya merelakan sedikit bagian dari gedung mereka untuk ditempati berjualan oleh perusahaan, memperbolehkan perusahaan menempelkan logo di beberapa tempat tertentu demi mendapatkan suntikan dana, atau mengizinkan korporasi untuk mempengaruhi keputusan riset (Derek Bok, 2003).

^{xiii}Lihat misalnya David Haryev, *A Brief History of Neoliberalism* dan *Neoliberalism as a Political Project*. Kajian kritis Harvey mengenai neoliberalisme berakar pada kompleksitas realitas yang terjadi pada pertengahan tahun 70-an sampai akhir 80-an. Hasil observasinya menunjukkan bahwa pada momen krusial tersebut kelas kapital sedang melakukan konsolidasi untuk mengembalikan kembali kekuasaannya. Latar belakang kesatuan ini diceritakan Harvey sebagai buntut dari degradasi kuasa kelas borjuis yang diakibatkan oleh digdayanya organisasi buruh dan Negara Kesejahteraan. Intensi ini pada akhirnya bertemu secara romantis dengan aliran pemikiran yang sedang naik daun yaitu neoliberalisme. Menurut Harvey, pemilik modal secara kebetulan menemukan kecocokan pandangan pada neoliberalisme sampai akhirnya menjalin hubungan erat. Interpretasi ini tentunya perlu dibedakan dengan analisis Michel Foucault tentang kemunculan neoliberalisme. Menurut Foucault, neoliberalisme merupakan sebuah *governmentality* dan *political rationale*. Neoliberalisme di tangan Foucault tidak lebih dari sekedar kelanjutan perjalanan dari episode *mode of government* sebelumnya. Untuk pembahasan komprehensif tentang neoliberalisme versi Foucault pembaca bisa menelusuri karya Michel Foucault *The Birth of*

Biopolitics atau Wendy Brown *Undoing the Demos: Neoliberal Stealth Revolution*.

^{xiv}Beberapa pemikir yang menggarisbawahi aspek politik dalam ruang adalah Hannah Arendt, Irish Mason Young, Seyla Benhabib.

Daftar Pustaka

Adi Putra, G., & Triwahyono, D. (2019). Privatisasi Dalam Ruang Publik: Studi Kasus Taman Merbabu Malang. *PAWON: Jurnal Arsitektur*, 69-78.

Althusser, L. (2014). *Ideology and Ideological State Apparatuses*. London: Verso.

Azra, A. (2008). Indonesian Higher Education: From Public Good to Privatization. *Journal of Asian Public Policy*, 139-147.

Benhabib, S. (1996). Models of Public Space: Hannah Arendt, the Liberal Tradition, and Jurgen Habermas. Dalam C. Calhoun, *Habermas and the Public Sphere* (hal. 73-98). Cambridge: The MIT Press.

Bhaskar, R. (1978). *A Realist Theory of Science*. Hassocks: Harvester Press.

Bok, D. (2003). *Universities in the Marketplace: The Commercialization of Higher Education*. New Jersey: Princeton University Press.

Boutang, Y. M. (2011). *Cognitive Capitalism*. Cambridge: Polity Press.

Brewis, E. (2018). Fair Access to Higher Education and Discourse of Development: A Policy Analysis From Indonesia. *Journal of Comparative and International Education*, 1-18.

Brown, F. (1995). Privatization of Public Education: Theories and Concepts. *Education and Urban Society*, 114-126.

Brown, W. (2015). *Undoing the Demos: Neoliberalism's Stealth Revolution*. New York: Zone Books.

Creswell, J. W. (2008). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London: SAGE Publications.

Danermark, B., Ekstrom, M., Jakobson, L., & Karlsson, J. C. (2005). *Explaining Society: An*

Introduction to Critical Realism in the Social Sciences. New York: Routledge.

David, P. A., & Foray, D. (2002). An Introduction to the Economy of the Knowledge Society. 9-23.

Darmaningtyas, Subkhan, E., & Panimbang, I. F. (2014). *Melawan Liberalisme Pendidikan*. Malang: Madani.

Drucker, P. F. (2011). *Post-Capitalist Society*. New York: Routledge.

Foucault, M. (1972). *The Archeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books.

Foucault, M., & Senellart, M. (2008). *The Birth of Biopolitics: Lectures at the College de France, 1978-79*. New York: Palgrave Macmillan.

Foucault, M. (1986). Of Other Spaces. *Diacritics*, 22-27.

Gandini, A. (2015). The Rise of Coworking Space: A Literature Review. *Ephemera*, 193-205.

Harre, R. (1970). *The Principles of Scientific Thinking*. London: Macmillan.

Harvey, D. (2007). *A Brief History of Neoliberalism*. New York: Oxford University Press.

Hood, C. (1991). A Public Management For All Seasons? *Public Administration*, 3-19.

Hood, C. (1995). The "New Public Management" in the 1990s: Variations on a Theme. *Accounting, Organizations and Society*, 93-109.

Howell, P. (1993). Public Space and the Public Sphere: Political Theory and the Historical Geography of Modernity. *Environment and Planning: Society and Space*, 303-322.

Ikhsan, M. (2002). Privatisasi BUMN: Mengapa dan Beberapa Kunci Sukses. *Ekonomi dan Keuangan Indonesia*, 247-277.

Klinenberg, E. (2018). *Palaces for the People: How Social Infrastructure Can Help Fight Inequality, Polarization, and the Decline of Civic Life*. New York: Crown.

Lefebvre, H. (2009). *The Production of Space*. Oxford: Blackwell Publishing.

Mitchell, D. (1995). The End of Public Space? People's Park, Definitions of the Public, and Democracy. *Annals of the Association of American Geographer*, 108-133.

Parkinson, J. (2006). Holistic Democracy and Physical Public Space. *British Journal of Political Science*, 1-17.

Parkinson, J. R. (2009). Does Democracy Require Physical Public Space? 101-114.

Peuter, G. d., Cohen, N. S., & Saraco, F. (2017). The Ambivalence of Coworking: On the Politics of an Emerging Work Practice. *European Journal of Cultural Studies*, 1-20.

Pranoto, T. (2010). Privatisasi, GCG, dan Kinerja BUMN. *Lembaga Management Fakultas Ekonomi UI*, 1-9.

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. London: RoutledgeCurzon.

Rosser, A. (2015). Neoliberalism and the Politics of Higher Education Policy in Indonesia. *Comparative Education*, 1-26.

Satriyo, A. B. (2012). Pengaruh Pertumbuhan Kawasan Kampus Terhadap Fenomena Privatisasi Ruang Jalan. *Masther Thesis*.

Savas, E. (1982). *Privatizing the Public Sector: How to Shrink Government*. London: Chatam House.

Sayer, A. (1992). *Method in Social Science: A Realist Approach*. London: Routledge.

Setiawan, B. B. (2010). Ruang Publik dan Modal Sosial: Privatisasi dan Komodifikasi Ruang di Kampung. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 28-38.

Soja, E. (1989). *Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory*. New York: Verso.

Stiglitz, J. (2002). *Globalization and Its Discontents*. New York: W.W. Norton & Company.

Sunaryo, R. G. (2010). Perubahan Setting Ruang dan Pola Aktivitas Publik di Ruang Terbuka Kampus UGM. *Seminar Nasional Riset Arsitektur & Perencanaan, Humanisme, Arsitektur & Perencanaan*, 175-182.

Uda, T. (2013). What is Coworking? A Theoretical Study on the Concept of Coworking. 1-15.